

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Anike Deswira

Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Tanah Datar
Email: anikedeswira@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy is expected to give authority to regions to be able to regulate their own people, make rules that function to manage their regions independently. With this research, it is expected to get a clear and transparent picture of the quality of the financial performance of the Tanah Datar Regency Government in the 2016-2020 period. This research is intended to see whether the regions can be independent in managing their finances in accordance with the spirit of regional autonomy. Regional financial ratios are used in this study as a measuring tool. The method used is descriptive quantitative method using secondary data. The data used is sourced from the financial statements of the Tanah Datar Regency Government for the 2016-2020 Fiscal Year. From the results of the analysis using the independence ratio, it can be concluded that Tanah Datar Regency does not yet have independence in its financial performance, this is illustrated by the percentage of the degree of fiscal autonomy which is only around 10% per year. The alignment ratio of the Tanah Datar Regency Government is still not aligned, this can be seen by the high operational expenditure compared to capital expenditure. The average operational expenditure per year is 71.91% while the average capital expenditure per year is 13.80%. If we look at the annual regional financial growth ratio, the average achievement is still very low at 6.33% per year. For the effectiveness ratio of Tanah Datar Regency's original revenue per year reaching 96.50%, this is still considered ineffective because the maximum number has not been reached, which is 100%.

Keywords: *independence, harmony, growth, effectiveness*

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberi kewenangan kepada daerah untuk bisa mengatur masyarakatnya sendiri, membuat aturan yang berfungsi untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kualitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 2016-2020. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah daerah sudah bisa mandiri dalam mengelola keuangannya sesuai dengan semangat otonomi daerah. Rasio keuangan daerah digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukurnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016-2020. Dari hasil analisis menggunakan rasio kemandirian diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Tanah Datar belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya, hal tersebut tergambar dari persentase derajat otonomi fiskal yang hanya berkisar di angka 10% pertahun. Untuk rasio keselarasan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tercatat masih belum selaras, hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya belanja operasional apabila dibandingkan dengan belanja modal. Rata-rata belanja operasional per tahun sebesar 71,91% sedangkan rata-rata belanja modal per tahun adalah sebesar 13,80%. Apabila dilihat angka rasio pertumbuhan keuangan daerah pertahun, rata-rata pencapaiannya masih sangat rendah

yaitu sebesar 6,33% per tahun. Untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar per tahun mencapai 96,50%, hal ini dihitung masih kurang efektif karena belum tercapai angka maksimal yaitu sebesar 100%.

Kata kunci: kemandirian, keselarasan, pertumbuhan, efektivitas

Pendahuluan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam suatu periode. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan secara berkala oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disusun sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu media atau cara yang dimaksudkan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurut Mahmudi pengertian analisis laporan keuangan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginterpretasikan angka-angka laporan keuangan dalam rangka mengetahui kinerja keuangan. Hasil analisis laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, atau politik (5). Analisis laporan keuangan ini menggunakan teknik analisis yang tepat agar bisa digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah keuangan yang ada di daerah.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang bisa digunakan, diantaranya adalah rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Dalam rangka pengukuran kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, digunakan analisis menggunakan teknik dan langkah yang tepat sehingga hasil analisis yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam pengambilan kebijakan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Ada beberapa teknik analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, antara lain teknik analisis varians, teknik analisis rasio, teknik analisis pertumbuhan, teknik analisis regresi dan teknik analisis prediksi.

Teknik pertama adalah teknik analisis varians, secara umum teknik ini menguji dua varians (ragam) berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Dalam melakukan analisis rasio keuangan dilakukan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Menurut Mahmudi teknik analisis rasio keuangan dapat digunakan dalam menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (5).

Teknik analisis berikutnya adalah teknik analisis rasio kemandirian, teknik ini paling sering digunakan karena dengan teknik ini pemerintah daerah dapat mengetahui apakah sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola dan mengurus program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri atau masih memiliki ketergantungan yang besar kepada bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Halim kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (2). Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan melakukan pembagian jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Menurut Mahmudi semakin tinggi jumlah perbandingan (dalam hal ini pendapatan asli daerah) maka semakin terlihat bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah (5). Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konstruktif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2)

Teknik analisis yang analisis berikutnya yang bisa digunakan adalah teknik rasio efektivitas PAD, teknik ini menggambarkan tentang kemampuan pemerintah daerah mewujudkan PAD sesuai dengan target yang ada dalam APBD. Target ini dihitung setiap tahun berdasarkan data potensi dan realisasi anggaran beberapa tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi daerah pada tahun berjalan. Menurut Mahmudi dalam menghitung rasio efektivitas PAD dapat dilakukan dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dengan pendapatan PAD yang mencapai target (5). Rumus yang dipakai dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (4)

Teknik analisis yang berikutnya adalah teknik rasio keserasian, teknik analisis ini membahas belanja operasi. Rasio ini didapatkan dengan membandingkan antara total biaya operasional dengan pengeluaran daerah. Dengan rasio ini akan didapatkan informasi tentang laporan bagian-bagian pengeluaran daerah yang digunakan untuk operasional. Dengan hasil analisis, pihak pengambil keputusan dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil analisis tersebut. Belanja operasional merupakan jenis belanja yang digunakan dalam jangka waktu satu tahun keuangan. Jenis belanja ini bersifat jangka pendek dan digunakan secara terus menerus dan berulang. Berikut ini merupakan rumus untuk penghitungan rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio belanja berikutnya adalah rasio belanja modal, rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah belanja modal yang terealisasi dengan jumlah belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Dengan rasio para pengambil kebijakan dapat melihat dengan lebih rinci jumlah pengeluaran daerah yang digunakan untuk investasi berupa belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Perhitungan rasio belanja modal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Menurut Halim ada sebuah teori yang menggambarkan hubungan antara principal dengan agen, teori ini dikenal dengan nama teori keagenan. Teori keagenan adalah sebuah teori yang menggambarkan mengenai hubungan antara principal dengan agen. Dalam pemerintahan khususnya pemerintah daerah, yang dimaksud dengan principal adalah rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah yang memberikan kepercayaan pengelolaan kekayaannya kepada agen, dalam hal ini gubernur/bupati/walikota untuk pemerintah daerah (3).

Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mengelola dana yang ada dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi dengan melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rasio belanja berikutnya adalah rasio pertumbuhan, rasio ini digunakan untuk memberikan penilaian tentang kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi dan menyempurnakan hasil yang telah bernilai baik tapi belum terlalu optimal dalam setiap periode sebelumnya. Menurut Halim dalam pendapatan dan pengeluaran rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai potensi dan hasil yang telah dicapai sehingga ke depan membutuhkan perhatian dan tidak lanjut (2).

Rasio pertumbuhan bisa dihitung menggunakan rumus serta kriteria sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100$$

Kemampuan Keuangan	Pertumbuhan (%)
Rendah Sekali	0%-10%
Rendah	11%-20%
Sedang	21%-30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber: Utomo (9)

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto. Kabupaten Tanah Datar dikenal juga dengan nama luhak nan tuo, hal ini karena Kabupaten Tanah Datar merupakan pusat kerajaan Minangkabau pada zaman dahulu kala. Hal ini sangat berpengaruh terhadap potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan pusat dari wisata budaya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan mampu mendongkrak roda perekonomian sehingga tingkat perekonomian di Kabupaten Tanah Datar dapat meningkat.

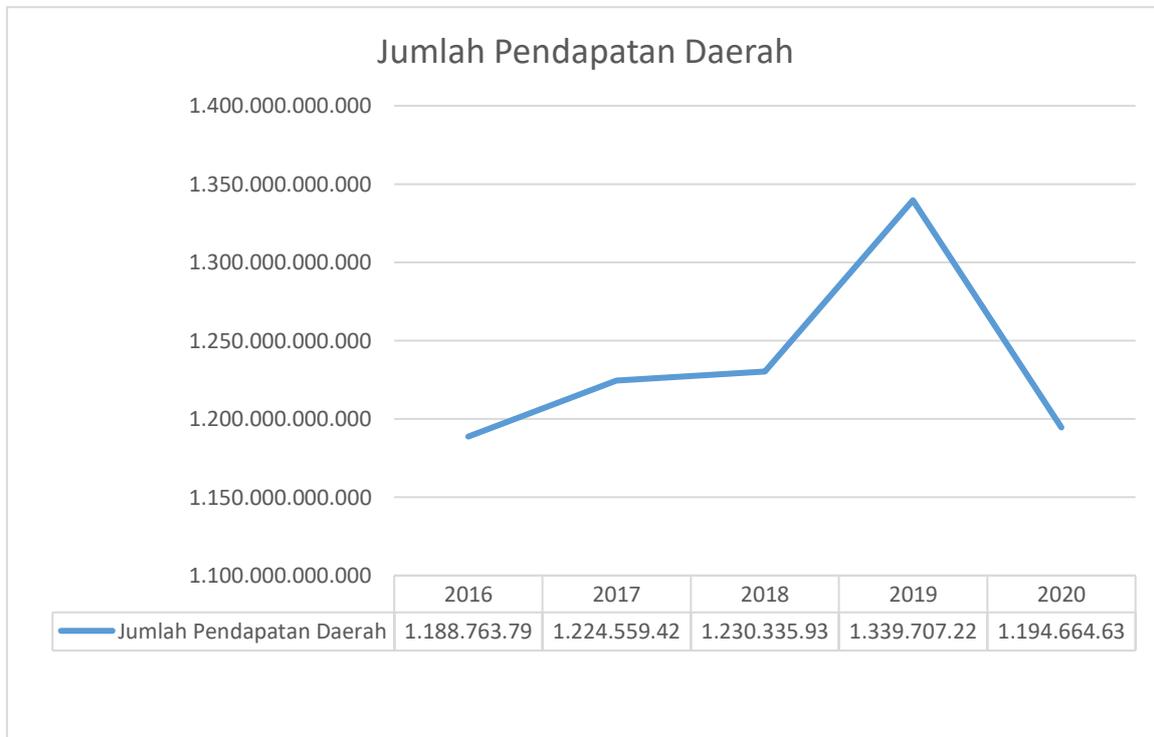
Dengan adanya penelitian ini diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat lebih terukur dan bisa dinilai sehingga dapat diambil langkah yang tepat oleh para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan guna keberlangsungan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar,

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga membandingkan dengan beberapa hasil kajian terdahulu yang juga membahas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya data pembanding ini diharapkan hasil kajian ini dapat lebih sempurna dan menimbulkan pemikiran baru yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amin menggambarkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2014. Hasil kajian ini menggambarkan tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76% pertahun, rasio efektivitas sebesar 105%, ini berarti berada pada tingkatan yang sangat efektif, rasio efisiensi mencapai angka 4,89% dan ini berarti sudah efisien, untuk rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD adalah sebesar 76,8% lebih besar apabila dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2%. Untuk rasio pertumbuhan, untuk PAD adalah sebesar 26,58%, dan untuk pendapatan secara umum adalah sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25% dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Bengkalis ini dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis sudah berada pada tingkat yang baik dan terus meningkat. Pada rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa terus terjadi peningkatan sehingga berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Untuk rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan terlihat kinerja keuangan daerah mengalami trend negatif trend negatif tapi itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerahnya (1).

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Siregar dalam melakukan analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2015-2017. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian Kota Depok sudah cukup bagus. Hal ini ditandai dengan derajat otonomi fiskal Kota Depok sudah berada pada tingkat cukup. Derajat otonomi fiskal adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunannya sendiri dengan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Hal ini juga dilihat dengan mulai berkurangnya peranan pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah Kota Depok. Apabila dilihat dari rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok telah berada pada tingkatan sangat efektif. Untuk rasio efisiensi PAD Kota Depok masih tergolong kurang efisien. Untuk rasio keserasian pada pemerintah Kota Depok masih terlalu banyak anggaran untuk belanja operasional dibandingkan dana yang dikeluarkan untuk belanja modal (7).

Grafik 1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020



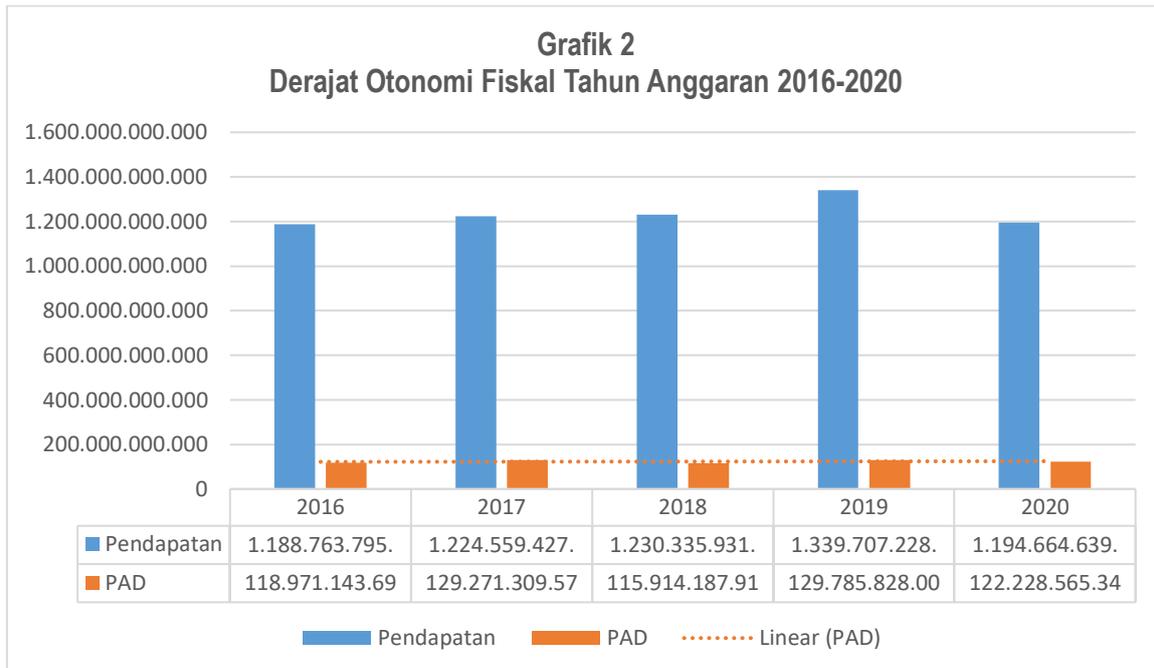
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tanah Datar cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi *covid 19* yang melanda seluruh dunia. Tahun 2016-2019 pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2019.

Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar yang terbesar bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dengan kontribusi PAD yang relatif masih sangat kecil dengan rata-rata 10 % setiap tahunnya. Persentase ideal untuk kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah rata-rata 30 % pertahun.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan PAD TA 2016-2020

Tahun	Pendapatan	PAD
2016	1.188.763.795.259,84	118.971.143.693,84
2017	1.224.559.427.709,56	129.271.309.574,56
2018	1.230.335.931.942,65	115.914.187.914,65
2019	1.339.707.228.547,89	129.785.828.001,89
2020	1.194.664.639.988,03	122.228.565.343,03

Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih sangat rendah. Hal ini menggambarkan bahwa kapasitas fiskal dari Kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat di susun penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah.

Metode Penelitian

Berdasarkan data yang ada maka penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar. Dalam menentukan sampel, kajian ini menggunakan sampling purposive. Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (8).

Hasil Pembahasan

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2016-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio

Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dari data tersebut akan dianalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Adapun hasil dari perhitungan analisis rasio tersebut adalah;

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian PAD

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

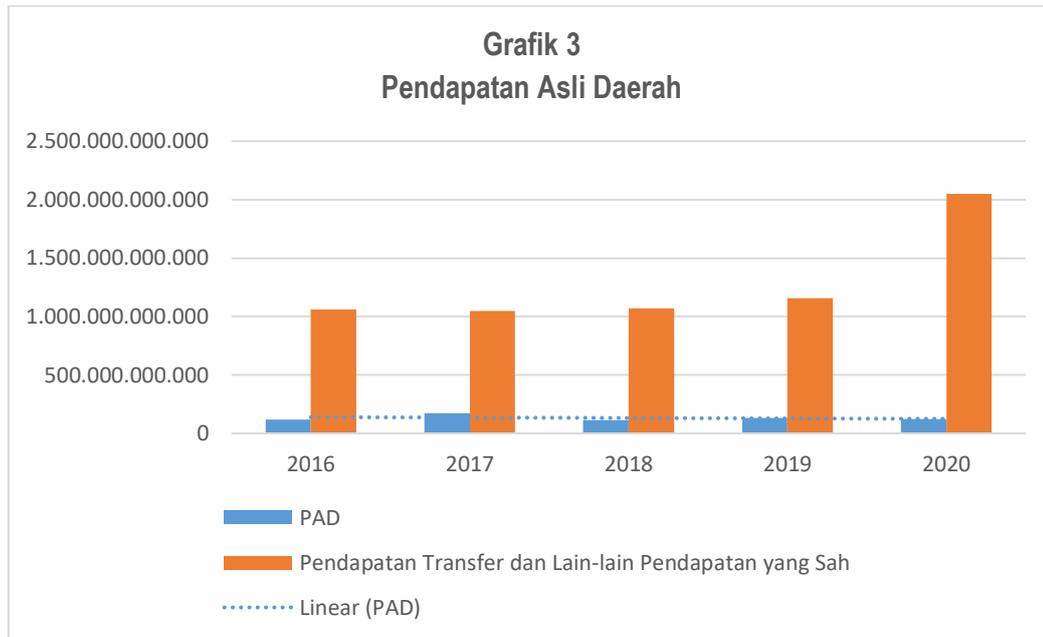
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

Tabel 2
Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun Anggaran 2016-2020:

Tahun	PAD	Transfer Pusat Atau Provinsi dan Pinjaman	Persentase	Nilai
2016	118.971.143.693	1.062.269.282.015	11,12	Rendah Sekali
2017	172.812.022.623	1.047.455.556.300	16,43	Rendah Sekali
2018	115.914.187.914	1.069.760.679.524	10,40	Rendah Sekali
2019	129.785.828.001	1.157.151.619.891	10,73	Rendah Sekali
2020	122.247.542.343	2.050.020.030.351	11,40	Rendah Sekali

Sumber: LRA Kabupaten Tanah Datar (diolah)



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Kabupaten Tanah Datar masih belum mandiri dan masih sangat bergantung kepada bantuan dana dari pusat dan provinsi. Penerimaan PAD sangat fluktuatif setiap tahunnya tergantung dengan regulasi dari pemerintah pusat. Ada beberapa aturan yang merubah kebijakan dalam penagihan pajak dan retribusi sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan dari sektor PAD. Pada tahun 2017 penerimaan PAD mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari Rp.118.971.143.693,84 pada tahun 2016 mengalami kenaikan Rp.172.812.022.623,56 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan PAD menjadi Rp.115.914.187.914,65 hal ini disebabkan oleh berpindahnya anggaran Dana Bos dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2019 PAD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.129.785.828.001,89 dan mengalami penurunan realisasi pada tahun 2020 menjadi Rp.122.247.542.343,03, hal ini terjadi karena adanya pandemi *covid 19* yang melanda dunia. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan rasio kemandirian berada pada posisi rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 berdasarkan Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

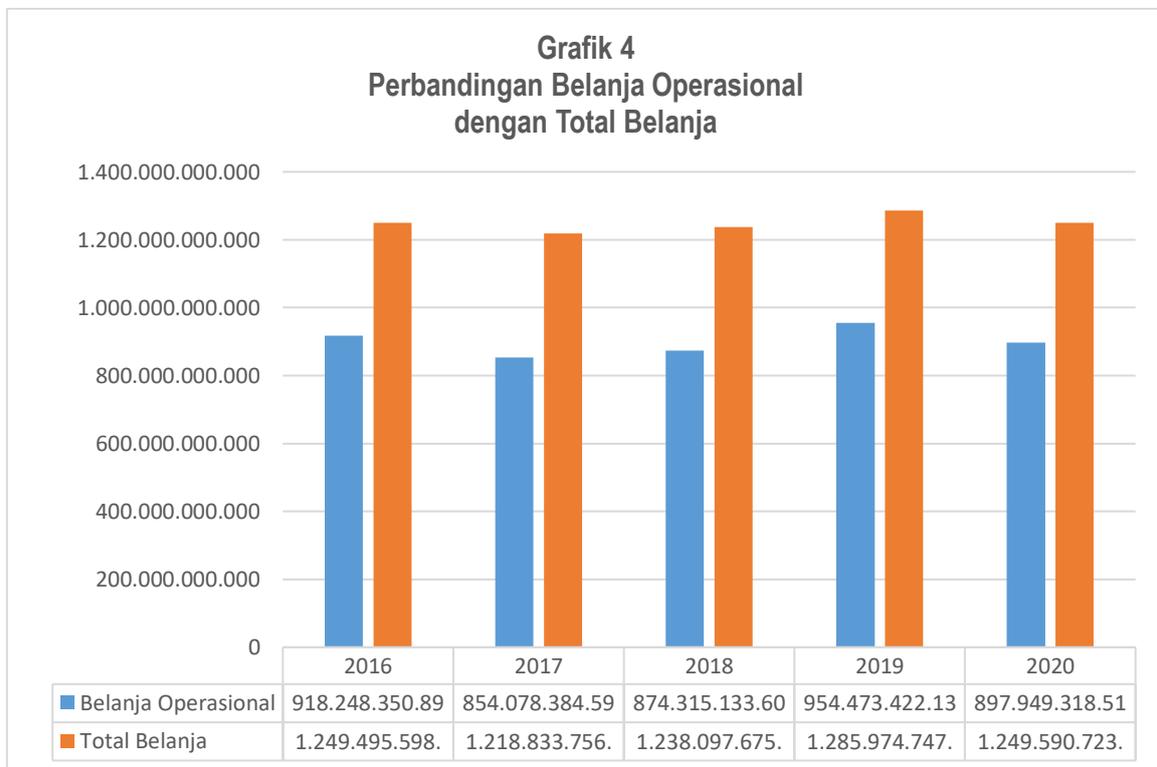
Analisis Rasio Keserasian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Tabel 3
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja Operasional	Total Belanja	Persentase
2016	918.248.350.898	1.249.495.598.573	73,49
2017	854.078.384.590	1.218.833.756.257	70,07
2018	874.315.133.604	1.238.097.675.117	70,62
2019	945.473.422.138	1.285.974.747.612	73,52
2020	897.949.318.515	1.249.590.723.887	71,86

Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase belanja operasional terhadap total belanja adalah sebesar 71,91 %. Belanja operasional terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 945.473.422.138 atau sebesar 73,52%. Pada tahun 2020 belanja operasional mengalami penurunan realisasi secara nominal dan secara persentase perbandingan belanja operasional dengan total belanja. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi *covid 19* yang menyebabkan adanya penurunan kegiatan sehingga berkurangnya belanja daerah. Pada masa pandemi *covid*

19 fokus belanja daerah hanya kepada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada kondisi normal belanja operasional selalu mengalami peningkatan setiap tahun, tapi pada saat kondisi pandemi total belanja operasional mengalami penurunan dari segi nominal dan persentase.

Berikutnya dapat dihitung rasio keserasian (Belanja Modal) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 4
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Persentase
2016	187.784.871.556,46	1.249.495.598.573,00	15,03 %
2017	197.916.990.531,23	1.218.833.756.257,00	16,24 %
2018	165.134.741.678,80	1.238.097.675.117,00	13,34 %
2019	202.885.384.184,50	1.285.974.747.612,00	15,78 %
2020	107.785.756.266,00	1.249.590.723.887,00	8,63 %



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa belanja modal Kabupaten Tanah Datar sangat fluktuatif dan berkisar di angka 13,80 % per tahunnya. Pada tahun 2020 belanja modal hanya sebesar Rp.107.785.756.266 atau 8,63 %, ini merupakan jumlah belanja modal dengan nominal terkecil selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pandemi *COVID-19* sehingga belanja modal yang ada hanya bersumber dari dana DAK. Dana DAU dan DBH lebih di prioritaskan penggunaannya untuk belanja operasional terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pengeluaran modal atau Belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan, tanah, gedung yang akan menjadi aset pemerintah.

Pada saat sekarang belum ada aturan yang mengikat mengenai penggunaan belanja modal dan belanja operasional, sehingga belum bisa ditentukan apakah belanja modal dan belanja operasional pada Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai standar atau belum.

Berdasarkan teori keagenan dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mengelola dana yang ada dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi dengan melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar belum bisa memenuhi peranannya sesuai dengan teori keagenan yang ada. Jumlah belanja modal yang masih sedikit menggambarkan bahwa masih belum maksimalnya pemerintah kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 berdasarkan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Menurut Putra Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (5).

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rasio pertumbuhan adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan}/r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100$$

Keterangan: P_n =Pendapatan, Belanja, yang dihitung tahun n
P₀=Pendapatan, Belanja, yang dihitung tahun 0 (tahun sebelumnya)
r =Rasio pertumbuhan

Tabel 5
Rasio Pertumbuhan Belanja

Tahun	Total Belanja (P _n)	Total Belanja (P ₀)	P _n -P ₀	Persentase
2016	1.249.495.598.573	1.218.833.756.257	-30.661.842.316	-2,45
2017	1.218.833.756.257	1.238.097.675.117	19.263.918.860	1,58
2018	1.238.097.675.117	1.350.362.869.491	112.265.194.374	9,07
2019	1.350.362.869.491	1.185.202.602.008	165.160.267.483	12,23

Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)

Berdasarkan tabel perhitungan rasio belanja di atas, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah belanja setiap tahunnya baik secara nominal maupun secara persentase. Rata-rata pertumbuhan peningkatan belanja daerah setiap tahun adalah sebesar 6,33%. Total belanja tertinggi sebesar 1.350.362.869.491 pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan adalah 12,23%.

Tabel 6
Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Total Pendapatan (Pn)	Total Pendapatan (Po)	Pn-Po	Persentase
2016	1.188.763.795.260	1.224.559.427.710	35.795.632.450	3,01
2017	1.224.559.427.710	1.230.335.931.943	5.776.504.233	0,47
2018	1.230.335.931.943	1.339.707.228.548	109.371.296.605	8,89
2019	1.339.707.228.548	1.194.664.639.988	145.042.588.560	10,83

Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan setiap tahun mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase pertumbuhan. Pada tahun 2016 total pendapatan adalah sebesar 1.188.763.795.260 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,01%. Total pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.339.707.228.548 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,83%.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa selalu terjadi peningkatan dalam penerimaan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar setiap tahun. Tapi ada kecenderungan dengan peningkatan pendapatan daerah maka akan terjadi juga peningkatan belanja daerah. Dari hasil Analisa terlihat bahwa belanja disesuaikan dengan pendapatan yang ada, semakin meningkat pendapatan maka akan terjadi peningkatan juga terhadap belanja.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Putra rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (5).

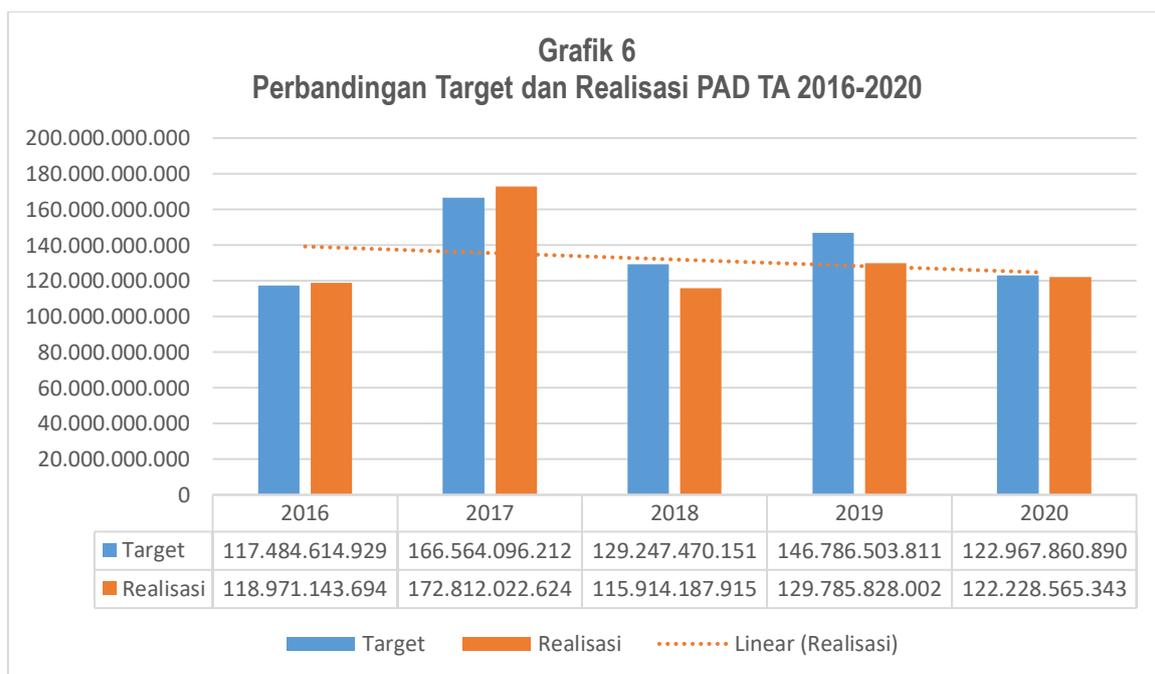
Rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100$$

Tabel 7
Realisasi PAD TA 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi PAD	Persentase	Nilai
2016	117.484.614.929	118.971.143.693	101,27	Sangat Efektif
2017	166.564.096.212	172.812.022.623	103,75	Sangat Efektif
2018	129.247.470.151	115.914.187.914	89,68	Cukup Efektif
2019	146.786.503.810	129.785.828.001	88,42	Kurang Efektif
2020	122.967.860.890	122.228.565.343	99,40	Cukup Efektif

Sumber: L R A Kabupaten Tanah Datar (diolah)



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektivitas PAD setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016-2017 rasio efektivitas PAD terlihat sangat efektif. Hal ini tergambar dengan tercapai realisasi di atas 100% apabila di dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan. Pencapaian paling rendah terjadi pada tahun 2019 dengan rasio efektivitas kurang efektif (88,42%), hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. Hal ini mencerminkan bahwa dalam menetapkan target pemerintah Daerah belum memperhatikan potensi yang ada sehingga masih belum bisa diprediksi realisasi yang akan dicapai.

Kabupaten Tanah Datar belum mempunyai data potensi yang akurat dan terukur, sehingga setiap tahun data target ditetapkan hanya berdasarkan rata-rata realisasi beberapa tahun yang lalu dan dibandingkan dengan data base yang ada. Potensi baru juga masih banyak yang belum tergali dan terdata sehingga rata-rata realisasi penerimaan PAD setiap tahun hanya berkisar di angka yang sama. Masih

kurangnya evaluasi dan pengawasan serta dukungan terhadap PAD sehingga menyebabkan PAD belum bisa memberikan kontribusi secara maksimal.

Simpulan dan Saran

Dari hasil analisis data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2020 berdasarkan analisis rasio keserasian belanja modal dibandingkan belanja operasional, dapat dilihat bahwa belum ada keserasian, dimana masih terlalu tinggi persentase belanja operasional apabila dibandingkan dengan belanja modal. Berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih berada pada kategori sangat rendah. Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar berjalan masih cukup efektif dimana bisa dilihat pertahunnya tingkat efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebesar 96,50 %.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat lebih teliti dan akurat dalam menganggarkan belanja. Belanja modal harus lebih ditingkatkan penganggaran dan penggunaannya. Total belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan keserasian antara belanja modal sebagai penggerak pembangunan. Anggaran belanja jangan hanya fokus kepada belanja operasional. Belanja operasional sebaiknya hanya digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan dan bukan menjadi belanja yang utama. Untuk pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan pencapaian pendapatan asli daerah dengan lebih menggali potensi yang ada sehingga daerah tidak terlalu bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Apabila dana yang berasal dari pendapatan asli daerah sudah tinggi minimal sebesar 30% maka tingkat kemandirian keuangan daerah berarti sudah tergolong bagus dan masuk ke kategori daerah yang mandiri.

Referensi

- (1) Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. Bengkalis: Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita).
- (2) Halim, A. (2012). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- (3) Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- (4) Halim, A. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.

- (5) Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
- (6) Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok. Rajawali Press.
- (7) Siregar, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat), Volume 9. Journal IMAGE Number 1, page 1-19.
- (8) Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- (9) Utomo, D.P. (2011). Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. Jurnal Education, 4, 57-80.